BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi organisasi masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana terorisme memang belum diatur secara khusus dan tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara tekstual. Namun demikian, apabila organisasi masyarakat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau tidak mematuhi larangan yang berlaku, maka organisasi tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana, bahkan sampai pada pembubaran organisasi. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan telah disahkan menjadi Undang-Undang.
2. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana terorisme mencakup individu (perseorangan) dan korporasi. Individu diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan frasa "setiap orang", sementara korporasi ditegaskan sebagai subjek hukum dalam Pasal 1 ayat (9) dan (10) undang-undang yang sama, mencakup badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Bahwa pertanggungjawaban organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana terorisme secara tekstual memang belum diatur secara

spesifik dan tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian sangat diperlukan kebijakan / politik hukum yang akan datang (*ius Constituendum*) untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana terorisme di Indonesia dalam konteks ini pengaturan mengenai Ormas sebagai subyek hukum diadopsi secara tegas dalam Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana terorisme dimasa yang akan datang.

B. Saran

1. Perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sangat mendesak dilakukan, terutama terkait pengaturan organisasi masyarakat (Ormas). Meskipun aspek Ormas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ketentuan tersebut kini dianggap kurang memadai dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang. Hal ini disebabkan oleh pembatasan penjelasan mengenai Ormas yang menyebarkan paham atau ideologi hanya pada atheisme, komunisme, serta marxisme/leninisme, padahal saat ini terdapat berbagai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, ketiadaan asas *contrarius actus* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menghambat pemerintah dalam mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Penulis berpendapat bahwa berbagai permasalahan mengenai organisasi masyarakat sudah semakin kompleks sehingga diperlukan perluasan norma subyek hukum organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Terorisme terutama organisasi masyarakat yang memang sudah terindikasi menyimpang dan menyebarkan paham-paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.